



Jurnal Ekonomi Syariah (JEKSYAR)

Annaafi Publisher

Journal Page is available to <http://jurnal.pptq-annaafi.org/index.php/jeksyar>



THE ROLE OF FISCAL POLICY IN ALLEVIATING POVERTY IN INDONESIA

Azizah Aghnie Fatika Sari¹, Maharani Segar², Mahmud Dwi Syarifudin³

Institut Teknologi Bisnis-AAS INDONESIA

email: aghniefatika08@gmail.com, maharanisegar288@gmail.com, syarifmids11@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received : 4 Januari 2024

Revised : 6 Januari 2024

Accepted : 10 Januari 2024

Publisher :

JEKSYAR :

Jurnal Ekonomi Syariah

ABSTRACT

Abstract

Fiscal policy is a policy that regulates or manages state revenues and expenditures with the goal of promoting economic development and maintaining stability. Government revenues and expenditures are one of the fiscal policy instruments. However, with the exception of distribution theory, none of the modern fiscal policy literature discusses ethical issues. Even so, it is only applicable to distribution theory. A library study is used in this research method. The outcomes of this discussion show that fiscal policy in Islam has always used a balanced budget system (a balanced budget) that is managed through Baitul Mal since the time of the Prophet SAW until now. Zakat, infaq, shadaqah, waqf, ghanimah, fa'i, kharaj, jizyah, u'shur, and khumus are examples of Islamic fiscal policy instruments.

Keywords: Fiscal Policy; A Balanced Budget System; Baitul Mal.

Abstraksi

Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang mengatur atau mengelola pendapatan serta pengeluaran negara yang bertujuan untuk menjaga stabilitas serta mendorong perkembangan ekonomi. Pendapatan serta pengeluaran pemerintah merupakan salah satu dari instrumen kebijakan fiskal. Namun secara literatur kebijakan fiskal modern nyatanya tidak ada satupun membahas terkait permasalahan etika, terkecuali pada teori distribusi. Hal itupun hanya sebatas teori distribusi. Metode penelitian ini menggunakan studi library. Hasil dari pembahasan ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal dalam Islam sejak zaman nabi SAW hingga saat ini selalu menggunakan sistem anggaran berimbang (balanced budget) yang pengelolannya melalui baitul mal. Instrument yang dikembangkan dalam kebijakan fiskal Islam antara lain zakat, infaq, shadaqah, wakaf, ghanimah, fa'i, kharaj, jizyah, u'shur, dan khumus.

Kata kunci: Kebijakan Fiskal; Sistem Anggaran Berimbang; Baitul Mal. Kata.

JEKSYAR : Jurnal Ekonomi Syariah

1. Pendahuluan

Kebijakan fiskal merupakan upaya yang dilakukan pemerintah dalam mendukung percepat pembangunan ekonomi. Disisilain, stimulus fiskal sebagai kebijakan counter cyclical untuk mengembalikan kestabilan perekonomian yang sedang mengalami resesi/krisis. Penggunaan kebijakan fiskal didasari oleh kemampuan instrument kebijakan fiskal dalam mempengaruhi aktivitas perekonomian, baik untuk mendorong peningkatan output perekonomian maupun untuk meningkatkan kesejahteraan (Wardhana dan Hartono, 2012).

Teori ekonomi mendefinisikan kebijakan fiskal ekspansif sebagai peningkatan subsidi di pemerintah. Dengan kenaikan subsidi pemerintah menyebabkan pengeluaran pemerintah meningkat, sehingga mampu mendorong naiknya tingkat investasi (Romer, 2001). Kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan yang di buat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan pemerintah berupa pajak. Dalam keadaan krisis dan kelesuan sector riil, sumber dana yang di peroleh dari pajak masih kurang, pengambilan utang yang terlalu besar akan mendorong peningkatan biaya bunga dan beban utang di masa depan (Ma'ruf, 2008). Secara umum kebijakan fiskal yang di terapkan di Indonesia sebagai negara berkembang adalah kebijakan yang ekspansif dengan menggunakan instrument anggaran defisit (Abimanyu, 2011).

Perbedaan dampak ekonomi yang ada pada kebijakan fiskal masih menjadi perdebatan diantara para peneliti. Kelompok pertama berpendapat kebijakan fiskal dalam pemotongan pajak yang di danai oleh utang dapat meningkatkan pengeluaran konsumen dan mengurangi tabungan nasional. Peningkatan pengeluaran konsumen menyebabkan permintaan agregat lebih besar dan pendapatan lebih tinggi dalam jangka pendek, akibatnya persediaan modal lebih kecil dan pendapatan lebih rendah dalam jangka panjang. Kelompok kedua adalah pandangan Ricardian, pemotongan pajak yang di danai oleh utang tidak mendorong pengeluaran konsumen karena sumber daya konsumen secara menyeluruh tidak meningkat. Implikasinya, utang pemerintah saat ini dianggap sama dengan pendapatan pajak di masa akan datang. Masyarakat yang berpikir rasional, mengetahui pajak masa depan sama dengan pajak saat ini. Oleh karena itu, masyarakat dapat menabung untuk membayar pajak masa depan, sehingga pemotongan pajak memicu kontraksi fiskal saat ini dan tidak akan mempengaruhi konsumsi karena masyarakat telah memprediksi akan terjadi ekspansi fiskal di masa depan (Swasono dan Martawardaya, 2015).

Kemudian apabila kebijakan pemerintah tidak berhasil dalam meningkatkan pendapatan dalam membayar utang. Maka pemerintah segera mengambil kebijakan dengan cara menstabilkan rasio utang agar terhindar dari deficit fiskal. Untuk menstabilkan rasio utang terhadap PDB dengan menerapkan kenaikan tariff pajak, sehingga kenaikan pendapatan pajak membuat kebijakan fiskal berkelanjutan. Sama halnya dengan pendapat Barro (1974) bahwa pajak dan utang pemerintah memiliki efek yang sama dalam perekonomian dimana utang pemerintah cenderung meningkatkan pajak dimasa depan yang merupakan asumsi penyebab terjadinya efek Ricardian Equivalen.

2. Landasan Teori

Definisi kebijakan fiskal adalah kebijakan penyesuaian di bidang pengeluaran dan penerimaan pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi. Atau dapat juga di katakana kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Menurut Ibrahim (2016) kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengaturan kinerja ekonomi melalui mekanisme penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan fiskal menyangkut pengaturan tentang pengeluaran pemerintah serta perpajakan yang secara langsung dapat mempengaruhi permintaan total dan dengan demikian akan mempengaruhi harga. Inflasi dapat dicegah melalui penurunan permintaan total. Kebijaksanaan fiskal yang berupa pengurangan pengeluaran pemerintah serta kenaikan pajak akan dapat mengurangi permintaan total, sehingga inflasi dapat ditekan. Menurut Rozalinda (2016), kebijakan fiskal

merupakan kebijakan pemerintah dalam mengatur setiap pendapatan dan pengeluaran negara yang digunakan untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi. Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan fiskal merupakan suatu kebijakan pemerintah yang di dalamnya terdapat peraturan yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran pemerintah dalam menjaga kegiatan ekonomi yang diinginkan atau kondisi yang lebih baik. Adapun instrumen dalam kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak.

1. Belanja/pengeluaran negara ($G = \text{government expenditure}$)

2. Perpajakan ($T = \text{taxes}$)

Kebijakan fiskal juga bias dikatakan salah satu kebijakan ekonomi makro yang sangat penting dalam rangka:

1. Membantu memperkecil fluktuasi dari siklus usaha

2. Mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang sustainable, kesempatan kerja yang tinggi

3. Membebaskan dari inflasi yang tinggi atau bergejolak. Pada dasarnya pemerintah harus menjadi panutan bagi masyarakat. Pemerintah haruslah berbelanja sesuai dengan pendapatan.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan dengan cara mengumpulkan data untuk memahami dan mengkaji teori dari berbagai literatur terkait. Penulis karya ilmiah cenderung lebih sering melakukan hal ini karena peraturan dan ketentuan yang lebih ketat berlaku untuk penelitian bibliografi dibandingkan dengan karya non-ilmiah. Belakangan istilah ini mulai digunakan dalam kegiatan penelitian karena pada awal penelitian perlu dibuat rencana penelitian. Dalam rencana penelitian ini, peneliti diajak untuk melakukan tinjauan pustaka terlebih dahulu. Setelah menyelesaikan penelitian, peneliti perlu menulis laporan hasil penelitian dan juga melakukan tinjauan pustaka.

4. Hasil Pembahasan

Secara konvensional kebijakan fiskal dimaksudkan sebagai alat rekayasa pemerintah dalam perekonomian yang menganut mekanisme pasar bebas yang diharapkan dapat mempengaruhi jalannya aktivitas perekonomian suatu negara. Kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Atau merupakan tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam bidang anggaran belanja negara dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Dapat diartikan kebijakan fiskal adalah penyesuaian dalam pendapatan dan pengeluaran pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara yang disingkat APBN untuk mencapai kestabilan ekonomi yang dikehendaki pada umumnya ditetapkan dalam rencana pembangunan.

Kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan penggunaan pajak, pinjaman masyarakat, pengeluaran masyarakat oleh pemerintah untuk tujuan stabilitas atau pembangunan sehingga terbentuk modal dan laju pertumbuhan ekonomi yang berjalan secara baik. Dasar kebijakan fiskal secara umum bertujuan untuk pemerataan pendapatan dan kesejahteraan. Akan tetapi, kesejahteraan dalam Islam mencakup kesejahteraan material dan spiritual. Oleh karena itu, nilai-nilai moral harus selalu mendasari dalam setiap kebijakan fiskal. Lebih spesifik lagi, kesejahteraan yang dimaksud dalam tujuan kebijakan fiskal Islam, yaitu kebijakan pemerintah dalam pengembangan masyarakat yang didasarkan atas distribusi

kekayaan berimbang, dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama.

Pemerintah Islam harus memastikan bahwa pajak zakat yang dikumpulkan dari setiap muslim kaya yang telah melebihi nilai minimum tertentu akan digunakan untuk tujuan yang telah ditentukan oleh syariah. Kebijakan Islam dalam regulasi pengeluaran dan pemasukan merupakan salah satu dari berbagai perangkat untuk mencapai tujuan tujuan syariah, termasuk mencakup kesejahteraan masyarakat. Tujuan tujuan syariah tersebut secara spesifik berfungsi untuk melindungi aqidah (*faith*), jiwa (*life*), akal (*intellect*), keturunan (*posterity*) dan kepemilikan (*property*), kehormatan, keamanan dan kesatuan negara. Perbedaan substansial antara Islam dengan konvensional dalam kebijakan fiskal adalah tidak ada kebijakan moneter yang memakai alat suku bunga, khususnya dalam peran dan manajemen dari kewajiban hutang publik.

Seluruh mekanisme pinjaman (*loan*) dalam Islam diproses dengan bebas bunga (*free – interest*). Penekanan dalam sistem Islam mengenai kebijakan pembelanjaan berorientasi pada keadilan dan bukan kepada pinjaman. Bandingkan dengan sistem berbasis bunga yang menitik beratkan varian problematika pada keefisienan dan ketidak efisienan, atau usaha-usaha menguntungkan dan tidak menguntungkan. Artinyavariasi- variasi sistem bunga relative terbatas dan jarang yang secara khusus didasarkan pada penerapan kriteria efisiensi dalam bidang ekonomi yang secara informal memiliki sektor moneter yang sangat luas dan terorganisasi. Walaupun dalam beberapa tujuan hamper sama dengan kebijakan fiskal antara ekonomi Islam dengan ekonomi modern seperti dalam aspek keseimbangan, pertumbuhan dan pembagian yang adil.

Akan tetapi, Islam mengaplikasikannya dengan tujuan untuk menerjemahkan aspek dan nilai hukum Islam. Seperti penetapan Islam terhadap kewajiban zakat merupakan bukti realisasi dari layanan Islam. Juga larangan Islam terhadap pembayaran dalam segala model pinjaman (*loan*) dengan mekanisme bunga, membuktikan bahwa ekonomi Islam tidak dapat dimanipulasi oleh pekerjaan dengan perhitungan suku bunga tersebut untuk dapat mencapai keseimbangan dalam pasar uang. Instrumen kebijakan model pinjaman tanpa bunga diaplikasikan dengan berbagai ragam model, seperti *equity financing* (penyertaan modal) dalam skema mudharabah, yaitu *fully equity financing* atau penyertaan modal secara penuh dalam suatu proyek usaha bagi negara dan skema musyarakah atau penyertaan modal secara bersama-sama antara negara dengan swasta dalam suatu proyek- proyek tertentu. Ada juga skema ijarah untuk suatu kontrak usaha dalam pengadaan atau pembangunan infrastruktur yang dapat dikerjakan oleh negara ataupun swasta untuk kepentingan publik.

5. Kesimpulan

Kebijakan fiskal adalah komponen kebijakan publik, yang merupakan tindakan kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah, yang berkaitan dengan pendapatan dan pengeluaran uang sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan umum. Kebijakan fiskal memiliki peran penting dalam sebuah negara sehingga dapat menunjang stabilitas ekonomi, alokasi sumber daya serta distribusi pendapatan pada suatu negara. Kebijakan-kebijakan fiskal yang strategis dan sesuai dengan prinsip- prinsip ekonomi Islam dalam operasionalnya yang tetappatuh pada syariah. Dengan demikian dapat melakukan terobosan-terobosan yang progresif serta diharapkan pendapatan negara akan optimal dan menciptakan kesejahteraan rakyat akan terjamin.

References

- Abimanyu, A. (2011). *Refleksi dan Gagasan Fiskal*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Barro (1974). Kausalitas Pengeluaran Pemerintah dan Penerimaan Pajak Indonesia 1970-2002. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*.
- Lubis, R., & Daulay, U. D. (2022). Peran Kebijakan Fiskal dalam Mengatasi Kemiskinan di Indonesia: Tinjauan Ekonomi Syariah. *TAZKIR: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial dan Keislaman*, 8(1), 73-90.
- Ma'aruf, Z., & Salamiah, S. (2008). Pembelajaran Quantum Teaching dengan Pendekatan Multi Kecerdasan untuk Meningkatkan Hasil Belajar Fiskal. *Jurnal Geliga Sains: Jurnal Pendidikan Fisika*.
- Rais, Sasli. 2002. Kebijakan Publik dalam Tinjauan Ekonomi Islam. Makalah Mata Kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Magister Universitas Indonesia, Kekhususan Ekonomi dan Keuangan Syariah, PSKTI, UI.
- Romer (2001). Pengaruh transfer antar pemerintah pada kinerja fiskal pemerintah daerah kota dan kabupaten di Indonesia. *Economic Journal of Emerging Markets*.
- Royat, Sujana Royat, 2008. Kebijakan Pemerintah dalam Penanggulangan Kemiskinan
- Soesastro, Hadi dkk (penyunting). (2005). *Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir*. Yogyakarta: Kanisius
- Sulekale, DD. (2003). Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Era Otonomi Daerah. *Jurnal Ekonomi Rakyat*, Artikel Th. II No. 2, April 2003.
- Supriyanto (2005). Analisis tentang Persoalan Kebijakan Fiskal Indonesia di Era Reformasi. *Jurnal Aplikasi Manajemen*, Volume 3, Nomor 3, Desember.
- Swasono, D. A., & Martawardaya, B. (2015). Pengaruh Defisit Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Periode 1990-2012. *Jurnal ekonomi dan pembangunan Indonesia*.
- Wardhana, W., & Hartono, D. (2012). Instrumen Stimulus Fiskal: Pilihan Kebijakan dan Pengaruhnya terhadap Perekonomian. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*.